

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Whella Puput Wiranti
whellapuput53@53gmail.com
Dr. Wahidawati, S.E., M.Si., AK. CA

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of financial accounting system (SAK), information technology, Intern control system on the quality of the financial statement of local government. Furthermore, The population of this research used 20 agencies and units at local government agencies (OPD) in the city of Lamongan. This research used primary data taken from the distributed questionnaire. Meanwhile, the sample collection technique of this research used a purposive sampling method based on certain criteria. Moreover, the research sample of this research used 60 respondents. Meanwhile, the analysis method used multiple linear regressios with SPSS Program 21 version (Statistical Product and Service Solutions). On the other hand, this research concluded that the financial accounting system had a positive and significant effect on the quality of the financial statement of local government with the regression coefficient of 0.000. Similarly, information technology had a positive and significant effect on the quality of financial statement of local governments with a regressions coefficient of 0.001. Also, the intern control system had a positive and significant effect on the quality of the financial statement of local government with a regressions coefficient of 0.002.

Keywords: financial accounting system, information technolog, intern control system, quality of financial statement of local government

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), teknologi informasi, sistem pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah badan dan dinas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Lamongan yang berjumlah 20 unit. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dimana sampel berdasarkan pada kriteria yang telah ditentukan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21 (*Statistical Product and Service Solutions*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan koefisien regresi sebesar 0,000. Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan koefisien regresi sebesar 0,001. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan koefisien regresi sebesar 0,002.

Kata Kunci: sistem akuntansi keuangan, teknologi informasi, sistem pengendalian intern, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya (Fahmi, 2013:1). Pemerintah ataupun badan usaha yang kepemilikannya mayoritas berada di tangan pemerintah selalu diidentifikasi sebagai

organisasi sektor publik yang memiliki tanggung jawab dalam pelayanan publik yang baik dan maksimal.

Era reformasi saat ini organisasi sektor publik terus mengalami perkembangan yang cukup pesat, seiring diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 januari 2001 melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pusat dan Pemerintahan Daerah, reformasi keuangan Negara baik di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah pun berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah di revisi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Bentuk pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, untuk menyusun kebijakan akuntansi (Pasal 97: Kepala daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi). Terdapat empat karakteristik laporan keuangan yang merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut PP No, 71 Tahun 2010 yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kualitas atau baik buruknya laporan keuangan pemerintah daerah tentunya dapat dilihat dari hasil pemeriksaan BK, opini-opini dari BK tentang laporan keuangan pemerintah daerah menjadi dasar kepercayaan masyarakat atas apa yang dipertanggung jawabkan oleh entitas pemerintah.

Hasil pemerintahan BPK tahun 2019 menunjukkan bahwa masih adanya permasalahan penyimpangan yang terjadi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah mengungkapkan 591 temuan yang memuat 931 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 86 kelemahan system pengendalian intern, 801 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 344,32 miliar, serta 44 permasalahan 3E sebesar Rp 99,92 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp 65,65 miliar. Hal tersebut dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Hasil Pemeriksaan Keuangan Pada Pemerintah Daerah

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Undang-Undang		Ekonomis, Efisiensi Dan Efektivitas	
	Jumlah Permasalahan	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Jumlah Temuan
86	801	344.529,23	44	99.921,82

(Sumber :www.bpk.go.id- IHPS II Tahun 2019)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun permasalahan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya tetapi adanya akibat kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undang ini tetap saja menyebabkan kerugian materi. Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah dan penyimpangan penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan pemeriksaan.

OPD kabupaten Lamongan mengalami peningkatan perbaikan dalam penerimaan opini oleh BPK selama 4 tahun terakhir ini, karena sebelumnya masih mengalami pengecualian. LKPD kabupaten Lamongan mulai tahun 2016 mengalami perbaikan dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut dianggap sebagai pembuktian bahwa pelaporan pertanggungjawaban di kabupaten lamongan telah mengalami perbaikan.

Latjandu *et al.*, (2016) menyatakan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yaitu sistem akuntansi keuangan. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan dalam menerapkan seluruh komponen dalam sistem akuntansi keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yaitu pemanfaatan teknologi informasi (Latjandu *et al.*, 2016). Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yg sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan system informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Penerapan sistem pengendalian intern juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Latjandu *et al.*, 2016). Penerapan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, sistem pengendalian intern perlu diterapkan sebagai usaha untuk mencegah terjadinya inefisiensi. Sistem Pengendalian Intern yang memiliki tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengaman asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini adalah: (1) Apakah sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?, (2) Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?, (3) Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (2) Untuk menguji pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (3) Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Agency

Teori *agency* adalah suatu kontrak dimana satu orang atau lebih, yang kemudian disebut sebagai prinsipal, menyewa serta memberikan wewenang kepada satu orang lain atau lebih, yang kemudian disebut agen untuk menjalankan tugas dan mengambil keputusan bagi kepentingan principal (Jensen dan Meckling, 1976). Teori ini berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. Hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi lebih detail tentang perusahaan, dibandingkan dengan principal.

Mahmudi (2016:19) Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan

yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi manfaat (prinsipal). Untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan, pemerintah daerah khususnya wajib mengikuti serta menerapkan standar akuntansi pemerintah dalam laporan keuangannya dan perlu adanya pengendalian intern disetiap Organisasi Perangkat Daerah yang didukung dengan kompetensi staff akuntansinya.

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Defitri, 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Definisi Laporan Keuangan

Menurut Afyiah dan Nunuy (2010), Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Organisasi Perangkat Daerah merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya yaitu tahap mengidentifikasi dokumen, tahap penjurnalan, dan tahap posting ke buku besar masing-masing akun. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan, adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri No 71 Tahun 2010, laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran , laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dijelaskan dalam PP 59 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengukuran, pengumpulan data, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer (Halim dan Kusufi, 2012).

Permendagri No. 59 2005 menjelaskan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam mengelola keuangan pemerintahan Daerah perlu adanya penerapan pengelolaan yang sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah. Terdapat prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Permendagri No.59, 2005) adalah tertib, taat pada peraturan Perundang-Undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (IT) adalah sub-sistem atau sistem bagian dari sistem informasi (Jogiyanto, 2008:3). Teknologi informasi dikelompokkan menjadi 6 kelompok, yaitu teknologi masukan (*input*), teknologi keluaran (*output*), teknologi perangkat lunak (*software*), teknologi penyimpanan (*storage*), teknologi telekomunikasi (*telecommunication*) dan teknologi mesin pemroses (*process*) (Kadir, 2005:5). Teknologi informasi selain sebagai teknologi computer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Menurut Hamzah *et al.*, (2009) Pemanfaatan teknologi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern menurut Permendagri No. 60 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1 (10) adalah: Sistem pengendalian intern adalah sesuatu proses yang di pengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah. Dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdapat lima unsure dari pengendalian intern pemerintahan, yaitu pengendalian lingkungan, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah menggunakan Kebijakan Akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Permendagri No. 13 2006 yakni sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, transaksi, atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hamzah *et al.*, (2009), Fajar (2010), Nurillah (2014), Latjandu *et al.*, (2016), dan Andriani *et al.*, (2016) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H_1 : Sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan

teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Penelitian yang telah dilakukan oleh Zuliarti (2012), Yosefrinaldi (2013), Delanno dan Deviani (2013), Hasyim (2017) dan Nurillah (2014) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H_2 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

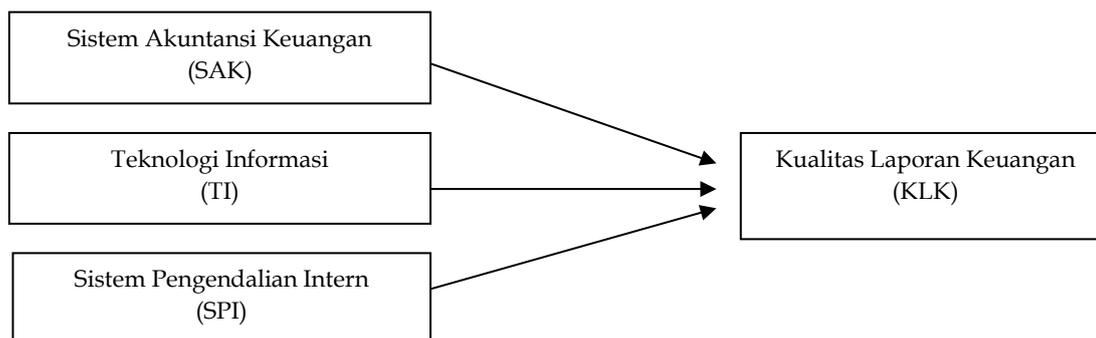
Pengaruh Sistem Pengendalian intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan sistem pengendalian intern menurut Warren *et. al.*, (2005). salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian intern (*intern control*). Hasil beberapa penelitian sebelumnya yang telah menguji variabel sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah diantaranya penelitian oleh Kalumata *et al.*, (2016:163), Herawati (2014:11), Evicahyani dan Djinar (2016), Latjandu *et al.*, (2016), dan Aditya dan Surjono (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H_3 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Rerangka Konseptual

Dari hasil perumusan hipotesis dapat ditarik kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian dengan kuantitatif dalam

bentuk penelitian survey melalui kuesioner. Penelitian kuantitatif bertujuan menunjukkan hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya, menguji teori dan menarik generalisasi yang mempunyai nilai prediktif (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Badan dan Dinas Daerah Kabupaten Lamongan yang berjumlah 20 unit.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Peneliti mengambil 5 Badan dan 20 Dinas Daerah Kabupaten Lamongan, dimana masing- masing dinas diberikan 3 kuesioner untuk pegawai yang menjabat sebagai kepala dan staff dibagian keuangan. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data subjek. Data subjek untuk penelitian ini dikumpulkan dengan kuesioner yang disebarakan secara langsung ke responden. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataprimer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Sugiyono, 2017). Dalam mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif digunakan skala likert. Skala likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala likert variabel yang akan diukur akan dijabarkan menjadi tolak ukur untuk menyusun item-item berupa pernyataan dan pertanyaan. Untuk dapat menganalisis masalah tersebutpeneliti memberikan angka pada jawaban. Daftar skala likert pada Tabel 2:

Tabel 2
Daftar Skala Likert

No	Uraian	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2016)

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Terdapat 2 macam variabel yang ingin diteliti peneliti, yaitu variabel independen dan dependen untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut.

Variabel Independen

Sugiyono (2017), variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab penyebabnya atau variabel yang memengaruhi timbulnya variabel dependen. Variabel independen penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern.

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang di pengaruhi oleh variabel lainnya (independen). Kualitas laporan keuangan merupakan variabel dependen dari penelitian ini.

Tabel 3
Operasional Variabel

Variabel	Pernyataan	Indikator	Data
----------	------------	-----------	------

Variabel Independen Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Nordiawan (2008)	1	Penerapan sistem akuntansi pada OPD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	SAK1	Ordinal
	2	Melakukan analisis transaksi/identifikasi transaksi pada setiap transaksi keuangan yang terjadi di OPD.	SAK2	Ordinal
	3	Melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi di OPD	SAK3	Ordinal
	4	Setiap transaksi keuangan didukung oleh bukti transaksi	SAK4	Ordinal
	5	Melakukan klasifikasi pada setiap transaksi yang terjadi	SAK5	Ordinal
	6	Pada Dinas ini dilakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos-pos semestinya	SAK6	Ordinal
	7	Sistem pengendalian dilakukan dalam mengukur dan melaporkan	SAK7	Ordinal
	8	Pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi	SAK8	Ordinal
Variabel Independen Teknologi Informasi (TI) Soimah (2014)	1	Penerapan Aplikasi sistem akuntansi pada OPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	TI1	Ordinal
	2	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara terkomputerisasi.	TI2	Ordinal
	3	Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	TI3	Ordinal
	4	Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.	TI4	Ordinal
	5	Jaringan internet telah dimanfaatkan kinerja karyawan untuk pemrosesan pengelolaan data dan pengaksesan untuk masyarakat.	TI5	Ordinal
Variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) Sukrisno (2004)	1	Terdapat tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku. (Penggunaan Formulir Bernomor Urut Cetak Terurut).	SPI1	Ordinal
	2	Pada OPD saya sudah diimplementasikan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dapat mencegah kecurangan dan penyelewengan.	SPI2	Ordinal
	3	Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran telah dibuatkan <i>Standar Operasional Procedure (SOP)</i> .	SPI3	Ordinal
	4	Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.	SPI4	Ordinal
	5	Adanya pemisahan wewenang secara tepat melakukan suatu kegiatan atau transaksi	SPI5	Ordinal
Variabel Dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK) (PP No. 71 Thn 2010)	1	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai transaksi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan	KLK1	Ordinal
	2	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan.	KLK2	Ordinal
	3	Informasi dalam laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	KLK3	Ordinal

4	Penyajian/penertiban laporan keuangan tepat waktu sesuai periode akuntansi.	KLK4	Ordinal
5	Laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan dimasa lalu.	KLK5	Ordinal
6	Laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang.	KLK6	Ordinal
7	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	KLK7	Ordinal
8	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.	KLK8	Ordinal
9	Informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas.	KLK9	Ordinal
10	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi sudah disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.	KLK10	Ordinal

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi linier berganda, dengan menggunakan bantuan *software IBM Statistical Package for Social Science (SPSS)*.

Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode analisis data statistik yang digunakan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dengan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017). Analisis deskriptif terdiri dari demografi responden dan pertanyaan kuesioner yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan melihat signifikansi koefisien korelasi antara masing-masing indikator atau item pertanyaan terhadap total skor variabel. Menurut Ghozali (2018) penentuan pengukuran uji validitas yaitu: (a) jika r hitung $>$ r tabel, maka pertanyaan dikatakan valid, dan (b) jika r hitung \leq r tabel, maka pertanyaan dinyatakan tidak valid. Nilai probabilitas dikatakan signifikan jika $p < 0,01$ atau $p < 0,05$.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu alat untuk mengukur sejauh mana jawaban kuesioner memiliki konsistensi yang digunakan pada waktu yang berbeda (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan *Cronbach's Alpha*, yang nilainya akan dibandingkan dengan nilai koefisien reliabilitas minimal yang diterima. Jika nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,6 maka instrumen penelitian dikatakan reliabel dan jika nilai *Cronbach's Alpha* $<$ 0,6 maka instrumen penelitian tidak reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, yaitu jika nilai signifikansi $\geq 0,05$, maka distribusi data

dinyatakan normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinieritas, peneliti menggunakan teknik *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan ketentuan jika $VIF \geq 10$ maka terjadi multikolinieritas, jika $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2018).

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan beberapa variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$KLK = a + \beta_1 SAK + \beta_2 TI + \beta_3 SPI + e$$

Keterangan:

KLK	: Kepatuhan Wajib Pajak
a	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
TI	: Teknologi Informasi
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
e	: Residual

Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji Kelayakan modal)

Uji kelayakan model digunakan untuk menguji secara simultan apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: (a) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka berarti variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen, (b) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka berarti variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: (a) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, dan (b) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

Koefisiensi Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai $R^2 = 0$ berarti variabel independen tidak dapat menjelaskan variasi variabel dependen dan nilai $R^2 = 1$ berarti variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Uji analisis statistik deskriptif menyajikan gambaran mengenai penelitian yaitu sistem akuntansi keuangan, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern. Sedangkan variabel

dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4-7.

Tabel 4
Tanggapan Responden Tentang Sistem Akuntansi Keuangan
Skor

Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Mean
	1	2	3	4	5	
SAK1	1	1	3	32	23	4,25
SAK2	0	1	3	32	24	4,31
SAK3	1	1	2	33	23	4,26
SAK4	1	1	3	39	16	4,13
SAK5	0	1	3	31	25	4,33
SAK6	1	1	6	29	23	4,2
SAK7	1	0	3	30	26	4,33
SAK8	1	0	5	33	21	4,21
Total						4,25

Sumber: Data primer diolah, 2021

Tabel 4, rata-rata responden variabel sistem akuntansi keuangan sebesar 4,25. Hasil ini di indikasikan dengan nilai rata-rata tanggapan responden tentang seluruh aspek sistem akuntansi keuangan. Dalam interval kelas nilai tersebut termasuk kategori $4,20 \leq X < 5,00$ yang menunjukkan bahwa responden memberi nilai sangat setuju pada sistem akuntansi keuangan.

Tabel 5
Tanggapan Responden Tentang Teknologi Informasi
Skor

Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Mean
	1	2	3	4	5	
TI1	0	2	2	34	22	4,26
TI2	0	3	2	29	26	4,33
TI3	0	2	1	38	19	4,23
TI4	0	2	1	40	17	4,2
TI5	0	1	4	34	21	4,25
Total						4,25

Sumber: Data primer diolah, 2021

Tabel 5, rata-rata responden variabel Teknologi Informasi sebesar 4,25. Hasil ini di indikasikan dengan nilai rata-rata tanggapan responden tentang seluruh aspek teknologi informasi. Pada interval kelas nilai tersebut termasuk kategori $4,20 \leq X < 5,00$ yang menunjukkan bahwa responden member nilai sangat setuju pada teknologi informasi.

Tabel 6
Tanggapan Responden Tentang Sistem Pengendalian Intern

Pernyataan	Skor					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
	1	2	3	4	5	
SPI1	0	2	6	34	18	4,13
SPI2	0	1	7	34	18	4,15
SPI3	0	1	7	31	21	4,2
SPI4	0	2	5	40	13	4,06
SPI5	0	1	5	30	24	4,28
Total						4,16

Sumber: Data primer diolah, 2021

Tabel 6, rata-rata responden sistem pengendalian intrn sebesar 4,16. Hasil ini di indikasikan dengan nilai rata-rata tanggapan responden tentang seluruh aspek teknologi informasi. Pada interval kelas nilai tersebut termasuk kategori $3,40 \leq X \leq 4,20$ yang menunjukkan bahwa responden memberi nilai setuju pada sistem pengendalian intern.

Tabel 7
Tanggapan Responden Tentang Kualitas Laporan Keuangan

Pernyataan	Skor					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
	1	2	3	4	5	
KLK1	0	0	5	38	17	4,2
KLK2	0	0	3	40	17	4,23
KLK3	0	1	1	35	23	4,33
KLK4	0	0	2	29	29	4,45
KLK5	0	0	3	45	12	4,15
KLK6	0	1	0	40	19	4,28
KLK7	0	0	2	35	23	4,35
KLK8	0	0	2	37	21	4,31
KLK9	0	0	2	40	18	4,26
KLK10	0	0	3	41	16	4,21
Total						4,27

Sumber: Data primer diolah, 2021

Tabel 7, rata-rata responden kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 4,27. Hasil ini di indikasikan dengan nilai rata-rata tanggapan responden tentang seluruh aspek kualitas laporan keuangan. Pada interval kelas nilai tersebut termasuk kategori $4,20 \leq X \leq 5,00$ yang menunjukkan bahwa responden memberi nilai sangat setuju pada kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas disajikan dalam Tabel 8-11.

Tabel 8
Hasil Uji Validitas Sistem Akuntansi Keuangan

Variabel	Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	Signifikansi	<i>r table</i>	Kesimpulan
Sistem	SAK1	0.872	0,000	0,3301	Valid
Akuntansi	SAK2	0.441	0,000	0,3301	Valid
Keuangan	SAK3	0.339	0.008	0,3301	Valid
	SAK4	0.790	0,000	0,3301	Valid
	SAK5	0.446	0,000	0,3301	Valid
	SAK6	0.862	0.035	0,3301	Valid
	SAK7	0.315	0.014	0,3301	Valid
	SAK8	0.313	0.015	0,3301	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2021

Pada Tabel 8, menunjukkan bahwa nilai signifikan pernyataan pada variabel sistem akuntansi keuangan rata-rata adalah 0,000 dan tidak ada yang lebih dari 0,05 sehingga variabel sistem akuntansi keuangandapat dinyatakan valid.

Tabel 9
Hasil Uji Validitas Teknologi Informasi

Variabel	Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	Signifikansi	<i>r table</i>	Kesimpulan
Teknologi	TI1	0.890	0,000	0,3301	Valid
Informasi	TI2	0.557	0,000	0,3301	Valid
	TI3	0.826	0,000	0,3301	Valid
	TI4	0.817	0,000	0,3301	Valid
	TI10	0.420	0.000	0,3301	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2021

Pada Tabel 9, menunjukkan bahwa nilai signifikan pernyataan pada variabel teknologi informasi adalah 0,000 dan tidak ada yang lebih dari 0,05 sehingga variabel teknologi informasi dapat dinyatakan valid.

Tabel 10
Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern

Variabel	Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	Signifikansi	<i>r table</i>	Kesimpulan
Sistem	SPI1	0.914	0,000	0,3301	Valid
Pengendalian	SPI2	0.641	0,000	0,3301	Valid
Intern	SPI3	0.575	0,000	0,3301	Valid
	SPI4	0.836	0,000	0,3301	Valid
	SPI5	0.516	0,000	0,3301	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2021

Pada Tabel 10, menunjukkan bahwa nilai signifikansi pernyataan pada variabel psistem pengendalian intern adalah 0,000 dan tidak ada yang lebih dari 0,05 sehingga variabel sistem pengendalian intern dapat dinyatakan valid.

Tabel 11
Hasil Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel	Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	Signifikansi	<i>r table</i>	Kesimpulan
Kualitas Laporan	KLK1	0.892	0,000	0,3301	Valid
Keuangan	KLK2	0.294	0.023	0,3301	Valid
Pemerintah Daerah	KLK3	0.393	0.002	0,3301	Valid
	KLK4	0.591	0,000	0,3301	Valid
	KLK5	0.816	0,000	0,3301	Valid
	KLK6	0.440	0,000	0,3301	Valid
	KLK7	0.413	0.001	0,3301	Valid
	KLK8	0.386	0.002	0,3301	Valid
	KLK9	0.547	0,000	0,3301	Valid
	KLK10	0.801	0,000	0,3301	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2021

Pada Tabel 11, menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing pernyataan pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah rata-rata adalah 0,000 dan tidak ada yang lebih dari 0,05 sehingga variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 12
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Sistem Akuntansi Keuangan	0.687	Reliabel
Teknologi Informasi	0.734	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0.734	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0.748	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2021

Pada Tabel 12, menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada seluruh variabel independen dan dependen lebih dari 0,6 sehingga seluruh variabel dapat dinyatakan reliabel.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel sistem akuntansi keuangan, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis regresi linier berganda ada pada Tabel 13.

Tabel 13
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	11.45	3.792		3.019	0.004
SAK	0.393	0.083	0.423	4.702	0,000
TI	0.455	0.124	0.357	3.661	0.001
SPI	0.399	0.123	0.32	3.252	0.002

a. Dependent Variable: KLIK
 Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 13 diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: $KLIK = 11,45 + 0,393SAK + 0,455TI + 0,399SPI + e$

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (1-sampelK-S). Data akan terdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05.

Tabel 14
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	60
	Mean
	0.000
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation
	2.0082544
	Absolute
	0.079
	Positive
	0.062
	Negative
Most Extreme Differences	-0.079
Kolmogorov-Smirnov Z	0.609
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.852

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah, 2021

Pada Tabel 14, menunjukkan hasil pengujian menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,852 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh terdistribusi normal dan layak dalam penelitian ini. Ketentuan grafik *Normal Probability Plot* antara lain: (a) apabila data (titik-titik) berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya, maka nilai residual terdistribusi normal, (b) apabila data (titik-titik) menjauh dan tidak mengikuti garis diagonalnya, maka nilai residual tidak terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen dan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinieritas. Data dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,1$. Berdasarkan hasil persamaan regresi yang telah diolah, maka hasil dari pengujian multikolinieritas ada pada Tabel 15.

Tabel 15
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
SAK	0.979	1.022
TI	0.836	1.197
SPI	0.82	1.22

a. Dependent Variabel: KP

Sumber: Data primer diolah, 2021

Pada Tabel 15, menunjukkan bahwa seluruh variabel independen Yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), Teknologi Informasi (TI), dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 . Nilai tersebut disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat multikolinieritas antar variabel dan dapat dikatakan model regresi layak untuk digunakan.

Uji Hipotesis

Hasil Uji Kelayakan (Uji F)

Hasil uji kelayakan model (*Goodness of fit*) disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16
Hasil Uji Kelayakan (F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	297.648	3	99.216	23.35	.000 ^b
Residual	237.952	56	4.249		
Total	535.6	59			

a. Dependent Variabel: KLK

b.Predictors: (Constant), SPI, SAK, TI
Sumber: Data primer diolah, 2021

Pada Tabel 16, menunjukkan nilai F hitung sebesar 23,35 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau < 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga dinyatakan layak untuk digunakan.

Hasil Uji Determinasi (R²)

Hasil pengujian koefisien determinasi R² disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.745 ^a	0.556	0.532	2.061

a.Predictors: (Constant), SPI, SAK, TI

b. Dependent Variabel: KLK

Sumber: Data primer diolah, 2021

Pada Tabel 17, menunjukkan bahwa koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan nilai *Rsquare* (R²) yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebesar 0,556 atau 55,60% dapat diartikan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh variabel sistem akuntansi keuangan, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern. Sisanya sebesar 44,40% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Hasil uji t disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig
	B	Std. Error	Beta	T	
(Constant)	11.45	3.792		3.019	0.004
SAK	0.393	0.083	0.423	4.702	0,000
TI	0.455	0.124	0.357	3.661	0.001
SPI	0.399	0.123	0.32	3.252	0.002

a. Dependent Variabel: KLK

Sumber: Data primer diolah, 2021

Pada Tabel 18 menunjukkan sistem akuntansi keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai *t*_{hitung} sebesar 4,702. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan yaitu 0,05 (0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan variabel sistem akuntansi keuangan

dapat berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga H_1 diterima. Pada Tabel 18 menunjukkan teknologi informasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 dan nilai t_{hitung} sebesar 3,661. Nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari tingkat kesalahan yaitu 0,05 ($0,001 < 0,05$). Hal ini menunjukkan variabel teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga H_2 diterima. Pada Tabel 18 menunjukkan sistem pengendalian intern memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 dan nilai t_{hitung} sebesar 3,252. Nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari tingkat kesalahan yaitu 0,05 ($0,002 < 0,05$). Hal ini menunjukkan variabel sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga H_3 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menyatakan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Lamongan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sistem akuntansi keuangan pada suatu organisasi, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat. Sistem akuntansi keuangan berkaitan erat dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pengukur dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) yang digunakan untuk informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Pengelolaan keuangan pemerintahan Daerah perlu adanya penerapan pengelolaan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Keuangan daerah juga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat. Selain itu Keuangan Daerah perlu dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fajar (2010), Latjandu *et al.*, (2016), Andriani *et al.*, (2016), Adhytama (2017), dan Artika (2016) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menyatakan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Lamongan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat penggunaan teknologi informasi pada suatu organisasi, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat. Pemanfaatan teknologi dalam hal ini aplikasi komputer akuntansi pada lingkup pemerintah pusat dan daerah dapat membantu pejabat pengelola keuangan OPD menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempertinggi efektivitas, menjawab kebutuhan informasi, meningkatkan kinerja, meningkatkan efisiensi aparatur pemerintah dalam mengerjakan pekerjaannya.

Hasil penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zuliarti (2012), Yosefrinaldi (2013), Nurillah (2014), Latjandu *et al.*, (2016), dan Hasyim (2017) yang menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten

Lamongan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sistem pengendalian intern pada suatu organisasi, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Penyajian informasi keuangan dapat diyakini kebenarannya dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas jika dilaksanakan dengan penerapan sistem pengendalian intern yang baik.

Hasil penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kalumata *et al.*, (2016:163), Hardyansyah (2016), Aditya dan Surjono (2017), Nurillah (2014) dan Latjandu *et al.*, (2016) yang menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan pemerintah daerah OPD Kabupaten Lamongan, maka dapat disimpulkan bahwa : (1) Sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan, (2) Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan, (3) Sistem Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini : (1) Penelitian ini hanya berfokus pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lamongan yang belum mencerminkan tingkat satuan perangkat kerja seluruh Indonesia, (2) Penelitian ini hanya mencakup tiga variabel bebas yang digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu sistem informasi akuntansi keuangan, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern, padahal masih terdapat banyak variabel.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini : (1) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan memodifikasi instrumen kuisioner dengan menambahkan pernyataan pernyataan negatif dalam kuisioner penelitian guna mengetahui keandalan data, (2) Penelitian selanjutnya hendaknya mengadakan penelitian yang lebih komprehensif dan menambah variabel-variabel lain seperti Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel moderasi dan Sumber daya manusia sebagai variabel independent untuk melengkapi topik penelitian yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode lain seperti metode kualitatif dalam mengumpulkan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhytama, S. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sasp), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi* 5(2).
- Aditya, O. R. dan W. Surjono. 2017. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Universitas Sangga Buana. Bandung.
- Afiyah dan N. Nunuy. 2009. *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Kencana. Jakarta.
- Andriani, S., S. Rahayu. dan H. Junaidi. 2016. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Merangin Tahun 2016). Universitas Jambi.
- Artika, Y. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemeirntah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Studi Pada OPD). Pekanbaru. *JOMFekon* 3(2).
- Defitri. 2018. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Mahaputra Muhammad. Sumatra Barat.
- Delanno, G. F. dan Deviani. 2013. Pengaruh Kapasitas Simber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal WRA* 1 (1): 21-45.
- Evicahyani, S. I. dan S. N. Djinar. 2016. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.3. ISSN: 2337-3067.
- Fahmi, I. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta. Bandung.
- Fajar, A. 2010. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. *Skripsi. Jurnal Akuntansi*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. dan S. kusufi. 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Hamzah, A., Yabbar. dan Rahman. 2009. *Konsep Dan Aplikasi Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual*. Penerbit Pustaka. Shvoong.com/writing-and speaking /presenting/2131804. Surabaya.
- Hardyansyah. 2016. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi Pada OPD Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 1:41-65.
- Herawati, T. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR - Study & Accounting Research*. XI(1): 2. Cianjur.
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency cost and Ownership Stucture. *Journal of Financial Economis*, Oktober, 1976, 3(4): 305-360.
- Jogiyanto. 2008. *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. BPFE. Yogyakarta.
- Kadir, A. 2005. *Dasar Pemrograman Web dengan ASP*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Kalumata, M. C. T., H. Ventje. dan J. D. L. Warongan. 2016. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Reviu Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Akuntansi*. Sulawesi Utara.
- Latjandu, I., L. Kalangi. dan J. J. Tinangon. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Universitas Sam Ratulangi. Manado. V(2).
- Mahmudi. 2016. *Manajemen Kinera sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen*. YKPN. Unit penerbit & percetakan. Yogyakarta.
- Hasyim. 2017. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Empiris di

- PEMDA Kabupaten Barru). Universitas Udayana. E-Jurnal AKUNTABEL 14(1). ISSN: 2302- 8556.
- Nordiawan, D. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nurillah. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SADK), (Studi Empiris Pada OPD Kota Depok). Universitas Diponegoro Semarang.
- Peraturan Pemerintah. No. 59 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah. No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah. No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah. No. 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara.
- Setiawan, I. W. N. dan Gayatri 2017. Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21: 671-700.
- Soimah, S. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. *Skripsi*. Universitas Bengkulu. Bengkulu.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sukrisno, A. 2004. *Auditing Pemeriksaan Akuntan. Kantor Akuntan Publik: Edisi Ketiga*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Jakarta.
- Warren. Fess. dan Reeva. 2005. *Pengantar Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- www.bpk.go.id – IHPS II Tahun 2019.
- Yosefrinaldi. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sumatera Barat). Fakultas Ekonomi. Universitas Ekonomi Negeri Padang. Padang.
- Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya ,Amusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus. Universitas Muria Kudus.